

Corporate Social Responsibility pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara

Ike Dwiyanthi

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: Ike.dwiyanthi@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the Implementation of Regional Social Responsibility (CSR) Regulations on PT Unggul Widya Teknologi Lestari Lestari in North Mamuju region, and the factors that influence it. To achieve these objectives, used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique. Based on the results of research, in the implementation there are various factors that influence the supporting factors and inhibiting factors. Factors supporting the existence of the Law that regulates, and Human resources are available. And the inhibiting factors are poor government and corporate relationships, public understanding of corporate social responsibility or lack of CSR, and government efforts in dealing with CSR issues.

Keywords: local regulation, policy, Regional Social Responsibility (CSR)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan peraturan daerah CSR. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah CSR belum terlaksana secara efektif. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni undang – undang yang mengatur dan sumberdaya manusia yang tersedia. Dan faktor penghambat yakni hubungan pemerintah dengan perusahaan yang kurang baik, pemahaman masyarakat mengenai CSR masih kurang, serta Upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: peraturan daerah, kebijakan, Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Beberapa negara di dunia terutama negara maju, peran pemerintah terlihat melalui regulasinya mampu memberikan pengaruh kepada entitas bisnis agar memiliki tanggung jawab sosial. Di Indonesia, sejak ditetapkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut menandakan bahwa perlunya

transparansi dalam pelaksanaan dan pencapaian program CSR.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara semakin kompleks. Anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah yang tersedot ke beberapa persoalan – persoalan pemerintahan, menyebabkan pemerintah tidak akan mampu mengatasinya sendirian. Karena itu kemitraan

dan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen khususnya dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial sangat diperlukan.

Pemerintah sendiri dalam melaksanakan program-programnya terkendala dengan berbagai hal diantaranya adalah terbatasnya kemampuan pendanaan. Disuatu lain, perusahaan melalui program CSR-nya dapat membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun bantuan pendanaan dari program CSR tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemerintah. Bantuan pendanaan dari program CSR hanya merupakan pendukung bagi program pemerintah.

Kebijakan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial yang mengharuskan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya dalam UU PT. (Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Kemudian UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".

Konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan.

Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua

perusahaan benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah.

Kabupaten Mamuju Utara sebagian besar merupakan daerah perkebunan, khususnya kelapa sawit. Saat ini ada sekitar enam perusahaan besar yang mengelola perkebunan dan juga pengelola minyak goreng. Salah satu diantaranya adalah perusahaan swasta PT. Unggul Widya Teknologi Lestari yang berada di Kecamatan Baras Desa Motu. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten Mamuju Utara, maka secara otomatis perusahaan tersebut dalam hal ini PT. Unggul Widya Teknologi Lestari diwajibkan mematuhi peraturan daerah tersebut.

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya, pelaksanaan program CSR masih kurang optimal, pemahaman masyarakat tentang adanya Program tanggung Jawab Sosial perusahaan atau bantuan perusahaan terhadap masyarakat sekitar pun masih sangat minim hampir sebagian masyarakat yang telah diwawancarai mengatakan tidak mengetahui akan bantuan tersebut. pola hubungan kemitraan antara pihak perusahaan dan pemerintah dalam penerapan program CSR pun tidak berjalan dengan baik

PT. Unggul Widya Teknologi Lestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang kegiatan operasionalnya secara langsung membawa dampak bagi lingkungan

khususnya masyarakat sekitar kawasan perusahaan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pihak perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar perusahaan.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi peraturan Daerah No. 5 tahun 2015 tentang CSR serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kabupaten Mamuju Utara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini memberikan gambaran seputar Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara

Adapun jenis data penelitian:

1. Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang

bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah dengan cara mewawancarai langsung informan yang paham dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir apabila peneliti sudah merasa data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Mamuju Utara Peraturan daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan dalam meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Mamuju Utara serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka perusahaan dalam hal ini PT Unggul Widya Teknologi lestari wajib melakukan tanggung jawab sosial Perusahaan. Melaksanakan tanggungjawab sosial secara normatif merupakan kewajiban

moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Tanggung jawab sosial perusahaan berkembang setiap dekade Hal tersebut dinyatakan oleh Dahlsrud (2006) yang mencatat ada sebanyak 37 definisi CSR di dunia. Banyaknya diskusi tentang isu CSR juga sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dimana perusahaan tidak hanya memberikan perhatian kepada pemilik saham (*shareholder*) semata akan tetapi juga perhatian terhadap kepentingan stakeholder berdasarkan peraturan yang berlaku dan bisnis yang berkelanjutan (OECD, 2004). Melihat entitas bisnis sebagai bagian isu sosial seperti dalam beberapa definisi CSR, menunjukkan adanya cara pandang yang lebih luas dari pada sekedar yang melihat perusahaan sebatas barang dan jasa bagi masyarakat. masyarakat merupakan sasaran dari program CSR, pemahaman masyarakat tentang CSR atau Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah hal terpenting dalam mengoptimalkan implementasi.

Adapun Program CSR yang dilakukan pada Tahun 2016 telah diuraikan berbagai bidang kerja CSR sebagai berikut:

1. Bidang kesehatan

- 1) Revitalisasi posyandu
Revitalisasi posyandu merupakan program bidang kerja kesehatan dimana PT. UWTL melakukan program *csr*-nya dengan membangun satu posyandu yang ada di desa Kasano dan pemberian kelengkapan alat posyandu di Desa Motu pada bulan juni
- 2) Sunatan Massal

Kegiatan sunatan massal dilakukan pada bulan november dengan jumlah peserta sebanyak 100 peserta di lakukan di kecamatan Baras

2. Bidang pendidikan

- 1) Bantuan buku sekolah dilaksanakan di SD Dusun Kapohu pada bulan desember.
- 2) Tanaman Vovasanga dilaksanakan di taman belajar Vovasanggayu pada bulan Juni
- 3) Honor guru SD & TK
Honorarium guru SD dan TK, diberikan kepada Guru SDN Bulili dan TK Widya dilaksanakan secara rutin setiap bulannya

3. Bidang Infrastruktur

- 1) Renovasi tempat ibadah dilakukan di salah satu tempat ibadah di sekitar Perusahaan PT. UWTL dilaksanakan secara Rutin setiap bulannya.
- 2) Perbaikan kualitas jalan dilakukan disekitar jalan perusahaan, dibuatkan jalan tani untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan.

4. Bidang Lingkungan

- 1) Tanaman Bakau
penanaman tanaman bakau ini dilakukan di Muara Sungai Majene sebanyak 10.000 tanaman bakau pada bulan april – juni
- 2) Penanaman Bambu
penanaman bambu dilakukan di sempadan sungai di PT UWTL pada bulan augustus – oktober.
- 3) Sekolah 3R
merupakan kegiatan pelatihan lingkungan hidup disekitar perusahaan PT UWTL namun belum ter-realisisasi
- 4) Perayaan hari Nasional
Bantuan perayaan hari lingkungan Hidup, dilakukan di masyarakat

sekitar perusahaan pada bulan juni.

Dari uraian program – program kerja beserta data sekunder program kerja CSR tahun 2016 PT Unggul Widya Teknologi Lestari terdapat 5 Bidang kerja CSR. Dalam peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada pasal 11 terdapat 10 Bidang kerja CSR yaitu

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Olahraga dan seni budaya
5. Sosial dan keagamaan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Usaha ekonomi kerakyatan
8. Penanggulangan bencana
9. Pemberdayaan masyarakat adat dan
10. Bidang kerja lainnya yg secara nyata memberikan dampak peningkatan kuitas masyaraat

Dari 10 bidang kerja CSR hanya 6 bidang kerja CSR yang dilaksanakan oleh PT Unggul Widya Teknologi Lestari . bidang kerja yang dilakukan hanya bidang kerja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Implementasi CSR PT UWTL dalam peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah PT UWTL laksanakan dalam beberapa tahun ini. PT UWTL telah melaksanakan berbagai kegiatan diberbagai bidang yang telah mencakup dalam ruang lingkup program bantuan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan .

Dampak program CSR tidak bisa dirasakan secara instan, namun mayoritas dari masyarakat yang menerima bantuan merasakan dampak yang positif, karena desa

mereka yang dibantu kelengkapan alat seperti bantuan pendidikan, kesehatan dan yang lainnya namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak merasakan dampak dari program CSR.

Konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional. Pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak dapat menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Dalam pelaksanaan program CSR , pola kemitraan pemerintah dan Swasta dalam hal ini PT UWTL sangatlah penting karena dalam menerapkan kebijakan CSR harus ada komunikasi yang terbangun antara keduanya Terkait peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan CSR perlu melakukan koordinasi dan sepengetahuan pemerintah daerah dan tim pengawas dari pemerintah daerah. dalam pasal 22 Perda No 5 Tahun 2015 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Mamuju Utara menyebutkan , penyelenggaraan program CSR yang dilakukan harus sepengetahuan pemerintah daerah dan tim pengawas CSR, dengan memenuhi beberapa mekanisme dan prosedur program CSR. Diantaranya

penyusunan rencana program dan kegiatan CSR atas usulan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan CSR kepada Bupati dan Tim pengawas CSR dan meminta persetujuan pelaksanaan program CSR kepada Bupati atas pertimbangan Tim pengawas bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Mamuju utara.

Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan daerah no. 5 Tahun 2015 Kabupaten Mamuju Utara dinilai berdasarkan beberapa variable implementasi menurut teori dari Van Meter dan Van Horn yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*).

2. Sumber daya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial,

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam pengimplementasian suatu program, karakter dari para pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Kinerja implementasi tanggung jawab sosial akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri

yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi tanggung jawab sosial. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana. Pemahaman mereka secara umum maupun secara rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan tersebut.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan external dalam hal ini lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang CSR pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara

Kekurangan dan keberhasilan yang ditunjukkan oleh Perusahaan PT Unggul

Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan program program dari kebijakan CSR yang di muat dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan itu jelas ada hal yang mempengaruhinya.

1) **Faktor Pendukung**

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya adalah:

a. Undang – undang yang mengatur Pelaksanaan program CSR tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat . dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program CSR di PT Unggul widya Teknologi Lestari ini adalah Undang – undang yang mengatur terkait CSR

b. Sumber daya Manusia yang tersedia
Sumber Daya Manusia yang dimaksud merupakan para Staff Perusahaan yang terlibat dan bekerja langsung terkait pelaksanaan program CSR merupakan pendukung utama dari implementasi kebijakan tersebut, dengan adanya divisi atau departemen khusus yang menangani program CSR yaitu departemen sustainability (ISPO) yang terdiri dari 3 orang

2) **Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa faktor pendukung penghambat diantaranya adalah:

a. hubungan pemerintah dan perusahaan

faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan CSR salah satunya adalah pola hubungan pemerintah dan perusahaan terlihat jelas dalam Sub Bab sebelumnya yang dijelaskan bahwa kurang baiknya pola hubungan pemerintah dan perusahaan misalnya komunikasi yang kurang

terbangun dalam penyelenggaraan Program CSR yang dilakukan, dalam penyusunan rencana program dan kegiatan CSR pemerintah tidak terlibat, tidak melakukan persetujuan pelaksanaan program CSR kepada Bupati berdasarkan pertimbangan tim Pengawas sesuai dengan Perda yang telah dikeluarkan.

b. Pemahaman masyarakat tentang CSR

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan CSR adalah pemahaman masyarakat tentang CSR, penting untuk diketahui oleh masyarakat karena sasaran dari kebijakan CSR ini adalah masyarakat.

c. Upaya pemerintah

salah satu faktor penghambat yaitu Upaya Pemerintah, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya lebih aktif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan CSR ini khususnya pada PT UWTL . Pemerintah dan perusahaan Swasta merupakan Mitra Kerja dan seharusnya hubungan keduanya terbangun dalam proses implementasi kegiatan CSR.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara telah terlaksana namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan Hal tersebut dikarenakan, Peraturan Daerah mengenai CSR ini belum digunakan sepenuhnya oleh perusahaan, dan masih terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah CSR meliputi dua faktor yaitu Faktor penghambat dan Faktor pendukung. Faktor pendukung meliputi Dasar Hukum atau undang undang yang mengatur

sebagai salah satu acuan perusahaan melakukan kegiatan CSR, serta sumber daya manusia yang tersedia, sedangkan faktor penghambat seperti hubungan pemerintah dan perusahaan yang kurang baik, pemahaman masyarakat terkait CSR yang masih kurang, dan upaya pemerintah dalam menangani persoalan CSR masih lamban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi T. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Alfitri. (2011). *Community Development : Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility : dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta .Raja Grafindo Persada.
- Deddy M, (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Donald S. dan Carl E.Van Horn. (2005). *Model Implementasi Kebijakan* Jakarta: Gramedia
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamdi, M. (2013). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hasrat. A. DKK. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal Usulan*
Penelitian dan Skripsi. Makassar.
- Ife , J. (2008). *Community Development : Alternative Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Indahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kartini, D. (2009). *Coporate Sosial Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Development Dan Implementasinya Di Indonesia*. Bandung. Refika Adiatma
- Kotler Philip dan Nancy L. (2005). *Corporate Social Responsibility; Doing the Most Good you're your Company and Your Cause New Jersey; JohnWiley& Sons,Inc.*
- Nugroho R. (2014). *Kebijakan publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Primahendra, R. (2011). *Public Relations & Corporate Social Responsibility*Jakarta: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)
- Purwanto, E dan Ratih S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat :kajian strategis pembangunan kesejahteraan social dan pekerjaan social*.Bandung: Refika Adiatma
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility : From Charity To Sustainability*. Jakarta. Salemba Empat
- Trihastuti N. (2013). *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*. Malang. Setara Press
- Untung, H, (2008). *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika,

- Urip, S. (2014). *Strategi CSR.Tangerang Selatan: Lentera Hati*
- Wahab,S , (1997). *Analisis Kebijakan Dari formulasi kebijaksanaan Ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*.Yogyakarta. Media Presindo.Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasandan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wahab, S. (2001), *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Jakarta: CAPS
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate SocialResponsibility)*. Fascho Publishing : Gresik.
- Wicaksono, MA. (2010). *AnalisisTingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung JawabSosial Perusahaan (Studi Kasus: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy PlantPondok Ungu)*Skripsi.Tidak Diterbitkan. Program Studi Sains Komunikasi danPengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor :Bogor.